

## DAFTAR PUSTAKA

- Adil, A. (2017). *Sistem Informasi Geografis* (1st ed.; P. Charistian, ed.).
- Amarrohman, F. J., Awaluddin, M., Yuwono, B. D., & Arifin, A. (2020). Analisis Keberadaan Kepulauan Seribu Terhadap Batas Pengelolaan Laut Provinsi DKI Jakarta. *Elipsoida*, 3(1), 88.
- Ambari, M. (2017a). Kenapa Pembangunan di Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Masih Tertinggal? Retrieved May 20, 2021, from Mongabay website: <https://www.mongabay.co.id/2017/08/23/kenapa-pembangunan-di-kawasan-pesisir-dan-pulau-pulau-kecil-masih-tertinggal/>
- Ambari, M. (2017b). Komitmen Pembangunan Pesisir dan Pulau Kecil Diragukan, Kenapa Bisa Terjadi? Retrieved May 20, 2021, from Mongabay website: <https://www.mongabay.co.id/2017/11/30/komitmen-pembangunan-pesisir-dan-pulau-kecil-diragukan-kenapa-bisa-terjadi/>
- Arsana, I. M. A. (2007). *Batas Maritim Antarnegara (Sebuah Tinjauan Teknis dan Yuridis)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Aurenhammer, F. (1991). *Voronoi diagrams: A survey of a fundamental geometric data structure*. *ACM Computing Surveys*.
- BIG. (2017a). Jumlah Pulau Indonesia Sebanyak 16.056 Pulau Masih Bisa Bertambah Lagi. Retrieved June 14, 2021, from [www.big.go.id](http://www.big.go.id) website: <https://www.big.go.id/news/2017/08/25/jumlah-pulau-indonesia-sebanyak-16-056-pulau-masih-bisa-bertambah-lagi>
- BIG. (2017b). Pemanfaatan Potensi Kemaritiman Indonesia Berbasis Informasi Geospasial. Retrieved June 14, 2021, from [www.big.go.id](http://www.big.go.id) website: <https://www.big.go.id/content/berita/antara-sejarah-budaya-dan-spasial-dalam-penamaan-rupabumi>
- Cosquer, G., & Hangouet, J. (2003). *Delimitation of Land and Maritime Boundaries : Geodetic and Geometric Bases*. *FIG Working Week 2003*. Paris.
- Djunarsjah, E., Sulistiyo, B., Hendriatiningsih, S., Wisayantono, D., Windupranata, W., & Setiyadi, J. (2010). Kriteria Penentuan Garis Batas Laut Untuk Mendukung Pengelolaan Sumberdaya Kelautan. *Geoid*, 4(2), 148–152.
- Halean, M., Lengkong, F., & Tampi, G. (2018). Pengelolaan Wilayah Perbatasan Antar Negara ( Studi Kabupaten Kepulauan Talaud ). *Jurnal Administrai Publik*, 4(62).
- Hidayat, F., & Sutisna, S. (2014). *Uji Geospasial Provinsi Kepulauan Di Indonesia*

- Pasca Berlakunya Undang-Undang No . 23 Tahun 2014 ( Geospatial Test of Archipelagic Province in Indonesia After the Enactment of. 20(2), 135–148.*
- ICA. (1973). Basic Cartography for Students and Technicians. *The Financial Assistance of UNESCO.*
- Indarto. (2010). *Dasar-dasar Sistem Informasi Geografis.* Jawa Timur: Jember University Press.
- Kementrian Kelautan dan Perikanan. (2018). *Buku Pintar Kementrian Kelautan dan Perikanan.*
- Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No 34/2002. *Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 34 Tahun 2002 Tentang Pedoman Umum Tata Ruang Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. , (2002).*
- Khomsin, & Simatupang, R. S. (2014). *Penentuan Batas Pengelolaan Wilayah Laut Daerah Antara Provinsi Jawa Timur Dan Provinsi Bali Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014.*
- Latif, A., & Agustan. (2017). *Karakteristik Data Geospasial Sebagai Dasar Perencanaan Untuk Memperkuat Ketahanan Perbatasan NKRI ( Studi Tentang Perencanaan Kota Perbatasan Distrik Sota , Merauke Provinsi Papua Dengan Papua Nugini ). 23(3), 263–279.*
- Permendagri No 141/2017. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 141 Tahun 2017 Tentang Penegasan Batas Daerah. , (2017).*
- Permendagri No 76/2012. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah. , Pub. L. No. 76 (2012).*
- Prahasta, E. (2002). *Konsep-konsep Dasar Sistem Informasi Geografis.* Bandung: Bandung : Informatika, 2002.
- Saksono, H. (2013). *Ekonomi Biru: Solusi Pembangunan Daerah Berciri Kepulauan Studi Kasus Kabupaten Kepulauan Anambas. 1–12.*
- Syafitri, A. K. N., Awaluddin, M., & A, F. J. (2017). *Analisis Pengaruh Pemilihan Peta Dasar Terhadap Penentuan Batas Pengelolaan Wilayah Laut Secara Kartometris (Studi Kasus : Kabupaten Sumenep, Jawa Timur). 6, 127–136.*
- Technical Aspect of the Law of the Sea (TALOS). 1982
- UNCLOS 1982. (1982).
- UU No 23/2014. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. , (2014).*

UU No 27/2007. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.* , (2007).

UU No 32/2014. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan.* , (2014).

UU No 4/2011. *Undang-Undang No 4 Tahun 2011 Tentang Informasi Geospasial.* , (2011).

UU No 6/1996. (1996). *Undang-undang Republik Indonesia Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia.* (1), 1–5.